

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia mempunyai hubungan politik luar negeri dengan banyak negara, yang bermanfaat nantinya untuk kelangsungan politik Indonesia. Hubungan yang dibangun tidak hanya seputar politik dan perdamaian, tapi juga akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial negara yang melakukan hubungan tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara anggota organisasi internasional, terutama Gerakan Non Blok (GNB) mempunyai tanggung jawab terhadap setiap peperangan yang ada. Setiap tindakan yang dilakukan oleh GNB untuk membantu suatu negara berdamai adalah tindakan yang merupakan visi dan misi dari GNB. Karena itulah diharapkan bisa menjadi penengah dan memberikan dukungan kemerdekaan terhadap negara yang memperjuangkan kemerdekaannya.

Salah satu negara yang menjadi perhatian dalam politik luar negeri Indonesia adalah permasalahan antara Israel dan Palestina. Yang terjadi sudah sejak lama dan belum ada penyelesaiannya. Untuk membicarakan dan penyelesaian permasalahan antara Palestina dan Israel, dibutuhkan sebuah organisasi yang didalamnya terdapat pihak yang tidak memihak atas peperangan tersebut. Organisasi bisa dikategorikan dalam 5 hal pokok: ¹

1. Fungsi informasi termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran dan desimasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini,

¹ Harold K. Jacobson, *Networks of Independence*, Alfred A Knopf, New York, 1979, hal. 89-90

organisasi internasional dapat mempergunakan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

2. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan dimana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi. Misalkan penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer.

Sedangkan dikategorikan dalam beberapa fungsi, maka organisasi mempunyai perannya sendiri. Peran organisasi dalam tingkat internasional mempunyai 6 peranan :²

² Karen Mingst, *Essentials of International Relations*, WW Norton & Company, New York, 1999, hal. 241-245

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara negara atau aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan negara dapat saling bersosialisasi secara reguler sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalist. Fungsi ini dapat kita temui dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
2. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang *Collective Goods*, dimana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survei dan juga pengawasan. Contohnya *World Trade Organization (WTO)*, *International Atomic Energy Agency's (IAEA)*.
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Contohnya : *World Trade Organization (WTO)* dan *International Court of Justice (ICJ)*.
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama. Misalkan *World Health Organization (WHO)* dalam penanganan penyebaran penyakit SARS dan *United Nation High Commission for Refugees (UNHCR)* dalam menangani pengungsi.
5. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan *European Council of Ministers* dan beberapa forum bersama tingkat menteri lainnya.
6. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internasional, rezim moneter Eropa, dan lain-lain.

Dari peran dan fungsi organisasi bagi sebuah negara itulah makanya Indonesia menggunakan organisasi sebagai wadah untuk membantu dan

meningkatkan politik luar negerinya. Indonesia ikut serta dalam beberapa organisasi dunia dan diberbagai bidang organisasi internasional. Dimana Indonesia merupakan anggota tetap dan pernah menjadi pemimpin dari organisasi GNB dan OKI. Gerakan Non Blok (GNB) merupakan organisasi yang dibangun dengan tujuan sebagai sarana bagi negara dunia ketiga untuk menghadapi kubu Barat dan kubu Timur demi tercapainya perdamaian dan keamanan dunia. Sedangkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau *Organization of Islamic Conference* (OIC) mempunyai tujuan memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara anggota dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan serta memperkuat perjuangan masyarakat Muslim diseluruh dunia untuk melindungi harga diri, kemerdekaan dan hak-hak mereka sebagai suatu negara.³

Alasan Indonesia memilih Gerakan Non Blok sebagai sarana untuk menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina adalah karena duapertiga anggota GNB adalah anggota PBB, yang nantinya bisa mempengaruhi hasil suara dan keputusan atas diterima atau tidaknya Palestina sebagai anggota PBB dan negara yang merdeka serta diakui oleh seluruh dunia. Gerakan Non-Blok merupakan kekuatan multipolar dan senantiasa menolak sistem bipolar yang merupakan ideologi utama semasa Perang Dingin berlangsung. Kelemahan OKI terletak pada tidak bisanya menghadapi ujian disaat kebijakan agresif Israel terhadap Palestina, dan ini kinerja OKI hanya sebatas pada kecaman dan himbauan melalui resolusi yang kurang efektif dan tanpa hasil yang nyata.

³ Djumadi M. Anwar, *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*, FISIPOL UMY, Yogyakarta, 2008, hal. 51

Indonesia pernah menjadi pimpinan GNB pada masa pemerintahan Soeharto yakni tahun 1992-1995 yang menghasilkan *Jakarta Message*. Banyak yang menganggap bahwa kepemimpinan Indonesia pada saat itu sedang berada di puncaknya. Presiden Soeharto membuat kagum semua anggota GNB yang lainnya dalam hal pengambilan keputusan dan mengeluarkan mandat bagi seluruh hasil yang dicapai.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam alenia ke empat disebutkan bahwa kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka Indonesia bertekad untuk membantu Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka. Berbagai cara telah dilakukan Indonesia diantaranya berperan aktif dalam berbagai sidang umum PBB, membentuk konferensi-konferensi, dan yang terakhir ikut serta dalam sidang Gerakan Non Blok di Bali.

Keaktifan Indonesia dalam setiap sidang umum PBB untuk mendukung kemerdekaan Palestina ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia di setiap pembahasan tentang Palestina yang dilakukan oleh PBB. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan membantu Palestina untuk mencapai kemerdekaannya. Dukungan yang dilakukan oleh Indonesia salah satunya adalah mengirimkan orang-orang yang nantinya dapat menyuarakan pendapatnya seperti Menteri Luar Negeri Indonesia Marty

Natalegawa. Indonesia mempunyai kedudukan yang penting dalam Dewan Keamanan tidak tetap pada Sidang Umum tanggal 16 Oktober 2006 dan menjadikan Indonesia dapat mewujudkan politik luar negeri bebas aktif guna mendukung kemerdekaan Palestina, karena politik bebas aktif adalah politik yang tidak memihak terhadap blok A dan blok B serta semata-mata hanya ingin mewujudkan perdamaian di antara negara-negara tersebut.⁴ Indonesia juga berjanji akan menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan memberikan dukungan agar Palestina bisa menjadi anggota tetap PBB, sebab isu kemerdekaan ini akan menjadi perhatian seluruh dunia.

Hal nyata lainnya yang dilakukan Indonesia adalah dengan memberikan dukungan bagi negara yang tengah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Salah satunya yaitu menggelar Forum Konferensi Internasional bertajuk *Striving to Fulfill the Rights of Palestinian People, Asia-Pasifik Community Conference (ASPAC) for Palestine* tanggal 29 - 30 Juni di *Jakarta Convention Center*.⁵ Konferensi tersebut bertemakan kepedulian terhadap kemerdekaan Palestina yang dihadiri 200 orang peserta dari lembaga sosial non pemerintah di 30 negara di Asia Pasifik. Diantara lembaga sosial tersebut adalah LSM nasional maupun internasional pro Palestina, seperti WAFAA Indonesia, Adara Relief International, PERSIS, Persatuan Umat Islam, Mathlul Anwar, ICMI, dan Spirit of Aqsha, KNRP (Indonesia), Al Jazeera (Jordania), dan Wisdom.

⁴ *Peran Indonesia Untuk Solusi Konflik Israel-Palestina* (diakses pada tanggal 3 November 2011); diunduh dari http://yankoer.multiply.com/journal/item/300/PERAN_INDONESIA_UNTUK_SOLUSI_KONFLIK_ISRAEL-PALESTINA

⁵ *Indonesia Dukung Kuat Palestina Merdeka Dalam ASPAC* (diakses pada tanggal 3 November 2011); diunduh dari <http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/06/29/indonesia-dukung-kuat-palestina-merdeka-dalam-aspac/>

Selain itu, Indonesia ikut aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina seperti dalam pertemuan Gerakan Non Blok yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada 25 Mei 2011. Peran lain yang dimainkan oleh Indonesia demi terciptanya sebuah perdamaian di Timur Tengah adalah dengan menjadi fasilitator bagi negara-negara yang dianggap sebagai *middle power* di Timur Tengah oleh Palestina, seperti Afrika Selatan, Brazil, India, serta Indonesia sendiri sebagai tuan rumah pertemuan tersebut.⁶ Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2010 di Jakarta, dimana membicarakan tentang kemajuan dan kesiapan akan Palestina jika merdeka nanti, mulai dari pembangunan hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Untuk kelancaran pertemuan ini, Indonesia tidak akan mengkoordinir pertemuan keempat negara tersebut, melainkan hanya memfasilitasi.

Inisiatif inipun nantinya akan bersifat *modest* dan *value added oriented*, serta tidak mengambil alih proses yang telah berjalan selama ini, karena pemerintah Indonesia tidak ingin '*over-prepared*' untuk menghindari ketidaknyamanan dari para pihak.⁷ Bentuk dukungan dari semua itu, Indonesia juga berjanji akan membantu Palestina dalam hal *financial assistance* sebesar Rp. 20 milyar untuk pembangunan Rumah Sakit di Gaza.

Mewujudkan sebuah keinginan tidaklah semudah yang diperkirakan, harus adanya sebuah kerjasama yang nyata serta di tunjukkan oleh Indonesia terhadap kemerdekaan yang ingin di capai oleh Palestina. Beberapa MoU (*Memorandum of*

⁶ *RI Tegaskan Untuk Kemerdekaan Palestina* (diakses pada tanggal 3 November 2011); diunduh pada <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/103-juli-2010/850-ri-tegaskan-dukungan-untuk-kemerdekaan-palestina.html>

⁷ *Ibid*

Understanding) yang sepakati oleh Indonesia dengan Palestina pada pertemuan tanggal 22 Oktober 2011 di istana negara. MoU antara Indonesia dan Palestina mengenai kerjasama teknis untuk pengembangan sumber daya manusia, MoU antara Kementerian Luar Negeri Indonesia serta Kementerian Luar Negeri Palestina mengenai pendidikan, pelatihan serta kerjasama di bidang hubungan diplomatik.

Untuk mewujudkan mimpi-mimpi Palestina sebagai negara yang merdeka tanpa adanya penjajahan, Indonesia membantu dengan menyumbangkan suara dan bantuannya. Cara-cara yang dilakukan diantaranya adalah melakukan konferensi dan pertemuan-pertemuan, yang mempunyai kepentingan dan tujuannya masing-masing, hal ini tidak terlepas dari upaya memberikan mendukung terhadap tercapainya kemerdekaan Palestina. Kekuatan dari negara tersebut haruslah di tunjukkan dengan dukungan dan bersatunya seluruh rakyatnya, tanpa adanya perpecahan di dalamnya.. Indonesia hanya menjadi mediator dan membantu memberikan dukungan, namun semua itu kembali kepada negara yang didukung tersebut.

B. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok guna mendukung kemerdekaan Palestina dan mendapatkan pengakuan dari PBB. Menjelaskan bagaimana peran aktif Indonesia dalam setiap konferensi ataupun pertemuan yang di ikuti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu :

“Bagaimana peran Indonesia di Gerakan Non Blok dalam mendorong kemerdekaan Palestina tahun 1992-2011?”

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab serta menganalisa pokok permasalahan di atas, dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis akan menggunakan konsep yang dapat mendukung penulisan karya tulis ini. Penulis menggunakan konsep Diplomasi.

Secara definisi, diplomasi diartikan sebagai “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat”.⁸ Diplomasi merupakan praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri dan pelaksanaannya. Unsur pokok diplomasi adalah negosiasi, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan melalui cara damai, teknik-teknik diplomasi biasa dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. Diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara, dimana

⁸ S.L. Roy, *Diplomacy* (edisi Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hal 3

diplomasi modern berhubungan erat dengan sistem negara dan diplomasi tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.

Tugas diplomasi ada empat macam : ⁹

1. Diplomasi harus menetapkan tujuan-tujuannya berdasarkan kekuatan yang sesungguhnya dan cakap yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan,
2. Diplomasi harus menilai tujuan-tujuan negara lain dan kekuatan yang sesungguhnya dan cakap yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan negara lain,
3. Diplomasi harus menetapkan seberapa jauh tujuan-tujuan yang berbeda ini cocok satu sama lain,
4. Diplomasi harus menggunakan sarana-sarana yang cocok untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Diplomasi mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pertemuan internasional dan konferensi multilateral serta diplomasi parlementer. Tujuan diplomasi ada 2 macam : ¹⁰

1. Tujuan Utama : mencapai tujuan nasional atau memajukan kepentingan nasional
2. Tujuan khusus, meliputi :

⁹ Hans J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Edisi Revisi, Yayasan Obor Indonesia; Jakarta, 1991. hal. 617

¹⁰ *Tujuan Diplomasi* (diakses pada tanggal 19 Desember 2011); diunduh dari <http://putradamhuji.blogspot.com/2010/08/tujuan-diplomasi.html>

- a. Politik, yaitu : mewujudkan integritas dan kebebasan politik, membujuk negara lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita serta mencapai tujuan dengan cara damai.
- b. Ekonomi : mencapai perolehan ekonomi demi kepentingan bangsa.
- c. Budaya : mempengaruhi pendapat umum negara lain dengan metode budaya.
- d. Ideologi : memasukkan negara lain kedalam ideologi negara sendiri, melestarikan sistem politik, ekonomi dan sosial budaya negara, menyebarkan sistem dan menghalangi sistem.

Diplomasi mencerminkan suatu relasi hubungan, komunikasi, dan keterkaitan. Diplomasi juga diartikan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara untuk mencapai politik luar negerinya. Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Diplomasi sering berkembang seiring dengan adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain. Dalam kegiatan diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian. Negosiasi merupakan teknik diplomatik untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional. Tujuan perundingan dapat dipenuhi dengan

jalan kompromi dan penyesuaian yang diperoleh melalui kontak hubungan pribadi secara langsung.

Diplomasi yang efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri. Kepentingan terdepannya adalah pemeliharaan keamanan nasional. Namun selain mengenai keamanan nasional itu, terdapat tujuan vital yang lain, yang diantaranya memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara sendiri di negara lain. Untuk menciptakan sebuah diplomasi yang sesuai dengan tujuannya, Indonesia melakukan beberapa cara yakni negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam Gerakan Non-Blok (GNB) yakni pada pertemuan GNB di Bali pada bulan Mei tahun 2011. Indonesia mengajak para anggota GNB untuk menyetujui kemerdekaan Palestina pada pertemuan PBB tanggal 19 September 2011. Indonesia akan membantu kemerdekaan Palestina dengan mengadakan Konferensi Tingkat Menteri ke 16 dan pertemuan peringatan 50 tahun GNB di Bali tersebut dengan tema yang diangkat dalam KTM kali ini adalah *Shared Vision on the Contribution of NAM for the Next 50 Years*.¹¹

Fungsi organisasi internasional bagi suatu negara sebagai :¹²

1. Instrumen bagi politik luar negeri. Negara-negara berkembang memanfaatkan PBB untuk meratakan kontribusi pembangunan.
2. Sebagai alat legitimasi politik luar negeri. Misalkan AS menggunakan PBB sebagai sumber legitimasi serangan militer ke Irak dan Korea.

¹¹ *GNB Tetap Perjuangkan Kemerdekaan Palestina* (diakses tanggal 11 November 2011); diunduh pada <http://indonesiandefense.blogspot.com/2011/05/gnb-tetap-perjuangkan-kemerdekaan.html>

¹² Karen Mingst, *Essentials of International Relation*, WW Norton & Company, New York, 1999, hal. 241-245

3. Memperoleh informasi yang berharga bagi suatu negara.
4. Membuat perilaku suatu negara yaitu menjaga suatu negara untuk mengambil tindakan tertentu dan menghukum terhadap negara yang mengambil tindakan salah. Misalkan *embargo* ekonomi di Irak, Serbia, dan Afrika Selatan.

Negosiasi lain yang dilakukan oleh Indonesia bisa dilihat dari Indonesia mengadakan GNB Komite Palestina dengan beberapa negara, diantaranya Inggris, Portugal, Pakistan, Irak, Swedia, dll. Perwakilan dari Indonesia juga menemui Menlu Inggris yakni William Hague untuk meminta pengelolaan yang baik tentang masalah kemerdekaan Palestina, yang berhubungan juga dengan Inggris adalah salah satu anggota Dewan Keamanan di PBB dan negara yang juga mempunyai hak veto di PBB selain Amerika Serikat.¹³

Perwakilan Indonesia memberikan mandat kepada Mesir selaku ketua GNB agar negara-negara yang belum mendukung kemerdekaan Palestina dan segera melakukan pengakuan demi perdamaian dan keadilan di negara tersebut. Hingga berakhirnya pertemuan tersebut, sudah hampir sebagian anggota GNB menyetujui untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Karena pada umumnya anggota GNB adalah negara berkembang, maka dapat memungkinkan untuk penarikan suara dan dukungan yang banyak terhadap permasalahan ini.

¹³ *Indonesia Dorong Non-Blok Akui Kemerdekaan Palestina* (diakses pada tanggal 11 November 2011); diunduh pada <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/24/160341/Indonesia-Dorong-Non-Blok-Akui-Kemerdekaan-Palestina>

E. Hipotesa

Untuk membantu Palestina memperoleh kemerdekaan, Indonesia membantu mewujudkan cita-cita Palestina tersebut dalam Konferensi Gerakan Non Blok. Setelah di perjelaskan dalam latar belakang masalah, maka menghasilkan hipotesa : Peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina adalah dengan cara negosiasi dengan negara anggota GNB untuk menghasilkan keputusan mendukung Palestina.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta interpretasi yang tepat dan bisa digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yakni dengan cara mengumpulkan data-data dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, buletin dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁴ Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal. 64.

3. Analisa Data

Teknik untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Teknik analisa ini dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif ini dapat berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati orang-orang.¹⁵ Kemudian menyusun data yang telah ada untuk kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Dalam kerangka penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih kepada upaya mencari pemahaman.¹⁶

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan skripsi ini adalah dimulai dari perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan pengakuan dari negara-negara anggota PBB. Hal ini lebih kepada peran Indonesia dalam memberikan dukungan terhadap Palestina dalam GNB. Pembahasan ini dimulai dari Indonesia pernah menjabat sebagai pimpinan GNB pada tahun 1992-1995 hingga KTT yang diadakan di Bali pada bulan Mei tahun 2011.

¹⁵ Arief Furchan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Usaha Nasional, 1992, hal. 21

¹⁶ Lexy Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2001, hal. 189

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari bab ke bab. *Bab I* merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan. *Bab II* merupakan penjelasan tentang keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non Blok (GNB), Kebijakan Umum dan Politik Luar Negeri Indonesia, Lahirnya Gerakan Non Blok (GNB), Tujuan Gerakan Non Blok (GNB). *Bab III* merupakan uraian tentang peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok dalam membantu kemerdekaan negara-negara anggota GNB, sejarah konflik Palestina, alasan Palestina ingin merdeka, upaya Palestina untuk bisa mendapatkan kemerdekaan. *Bab IV* merupakan uraian tentang upaya Indonesia dalam Gerakan Non Blok untuk mendukung kemerdekaan Palestina, alasan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, upaya Indonesia terutama dalam Gerakan Non Blok untuk kemerdekaan Palestina. *Bab V* Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta Lampiran dan Daftar Pustaka, berisi data buku, literatur, dan artikel yang digunakan selama penulisan dan dicantumkan dalam tulisan ini.